

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Volume 15, Nomor 2, Juli 2021: i-xx
Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2 Surat Keputusan Kemenristekdikti: No: 34/E/KPT/2018
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah bidang kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34/E/KPT/2018 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018, menetapkan bahwa Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

Penasihat	:	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Penanggung Jawab	:	Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
Pengarah	:	1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM 4. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Ketua Dewan Redaksi (Editor)	:	Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
Anggota Dewan Redaksi (Section Editor)	:	1. Edward James Sinaga, S.Si., M.H. 2. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. 3. Nizar Apriansyah, S.E., M.H. 4. Trisapto Wahyudi Agung N, S.S., M.Si. 5. Ahmad Jazuli,S.Ag., M.H. 6. Haryono, S.Sos., M.H. 7. Imam Lukito, S.T., M.H.
Redaksi Pelaksana	:	Fitriyani, S.H., M.Si.
Sekretaris	:	1. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P. 2. Ibnu Prasetyo, S.H.
Penyunting Tata Bahasa dan Naskah (Copyeditor)	:	1. Amirah Balqis S.H. 2. Novzel Ridho Abednego Hasugian ,S.I.P. 3. Mira Sukmawati ,S.I.P.
Teknologi Sistem Informasi	:	1. Machyudhie, S.T. 2. Mochamad Arip, S.Kom. 3. Harysandy Permana, S.Kom. 4. Agus Priyatna, S.Kom.

Alamat Redaksi:

Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021-2525015 ext. 512 /514 Fax. 021-2522954
ejournalkebijakan@gmail.com

HALAMAN KOSONG

Kami mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari
yang telah menelaah naskah sehingga dapat diterbitkan.

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

2. Dr. Ricca Anggraeni., S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Pancasila

3. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

4. Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

5. Dr. Edy Santoso, S.H., M.H.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

6. M. Ali Equatora, A.Ks., M.Si.
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

HALAMAN KOSONG

DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN (*ARTICLES*)

1. Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembebasan Narapidana dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Covid-19 di Dusun Punjul Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung 165-180
   Hasim Asngari, Padmono Wibowo
2. Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri 181-198
   Ardyan Gilang Ramadhan, Maria Lusyana Br Ginting, Chintia Octenta
3. Analisis Lingkungan Strategis Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Rutan Kelas IIB Kudus 199-214
   Landra Fikri Dzaky, Arisman
4. Pelindungan Rahasia Dagang dalam Industri Jasa Telekomunikasi.....215-230
   Ahmad M Ramli, Sinta Dewi, Laina Rafianti, Tasya Safiranita Ramli
5. Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu 231-256
   Ilham Yuli Isdiyanto, Deslaely Putranti
6. Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....257-270
   Supriyadi, Andi Intan Purnamasari
7. Analisa Kebijakan Penerapan Sistem Merit dalam Penempatan Lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi 271-286
   Insan Firdaus

TINJAUAN HUKUM *(REVIEW)*

8. Kebijakan Nonpenal dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah 287-304
   Faisal, Nursariani Simatupang
9. Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi 305-326
   Moch. Ridwan
10. Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM 327-346
    Rizki Bagus Prasetio

HALAMAN KOSONG

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum kembali terbit menemui para pembacanya. Salawat serta salam tak lupa pula disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah mengubah cakrawala berpikir umat manusia dari pemikiran tradisional mistis ke era rasionalitas ilmiah modern. Eksistensi dan keberkalaan suatu penerbitan jurnal ilmiah di berbagai lembaga Litbang selalu menjadi masalah sekaligus tantangan bagi setiap pengelolanya, mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, minimnya artikel/tulisan masuk dan penyesuaian ketentuan penulisan ilmiah yang disyaratkan oleh instansi pembina.

Pada Volume 15 Nomor 2, Juli 2021 ini, redaksi memuat artikel sebanyak 10 tulisan. Dalam edisi ini dimuat hasil-hasil penelitian dan tinjauan hukum dan hak asasi manusia, mulai dari analisa kebijakan/peraturan perundang-undangan, pemasyarakatan, dan kekayaan intelektual. Naskah tulisan yang masuk telah diseleksi secara ketat oleh Dewan Redaksi serta melalui penelaahan dan penilaian dari Mitra Bestari. Oleh karena itu tidak semua tulisan yang diterima dapat dimuat pada Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum terbitan ini. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kualitas substansi tiap-tiap tulisan, sehingga mutu dan kualitas tulisan tetap terjaga sesuai analisis dan pembahasannya. Dari hasil seleksi dimaksud kami memuat tulisan berupa hasil penelitian yang tidak hanya ditulis oleh Peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM namun juga dari Institusi/Akademisi dari pelbagai daerah di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para Mitra Bestari yang telah melakukan penelaahan, analisis dan penilaian atas kelayakan tulisan untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada seluruh penulis yang telah berkenan menyumbangkan artikel/tulisannya.

Akhirnya, kami berharap semua hasil penelitian dan tinjauan hukum dan hak asasi manusia yang dimuat dalam jurnal ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan dan pembangunan hukum dan kebijakan di Indonesia. Kami pun terbuka dalam menerima kritik dan saran konstruktif sebagai perbaikan dan penyempurnaan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum di masa yang akan mendatang.

Selamat Membaca,

R E D A K S I

HALAMAN KOSONG

Volume 15, Nomor 2, Juli 2021

p-ISSN: 1978-2292 (print)
e-ISSN: 2579-7425 (online)

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

BALITBANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I

HALAMAN KOSONG

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Hasim Asngari, Padmono Wibowo (The Ministry of Law and Human Rights)

Community Response To The Convict's Liberation Policy In Order To Countermeasure The Covid-19 In Punjul Hamlet Punjul Village Karangrejo Subdistrict Tulungagung District

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 2, Juli 2021

The coronavirus (Covid-19) outbreak that is sweeping the world today, it is not an outbreak that is taken lightly or ignored. Implementation of government policy regarding convict exemption through assimilation program and integration program is a form of effort in tackling the spread of Corona Covid-19 virus in correctional institution, special development Institutions for children, and state detention houses. The purpose of this research is to know the community response to the convict's liberation policy in order to countermeasure the spread of Corona virus Covid-19 in RT 022 RW 006 in Punjul, Karangrejo, Tulungagung which is viewed from three dimensional cognitive , affective, and conative. The study method used a descriptive quantitative approach with a population amounting to 102 people, randomly sampled a number of 42 respondents. The data collection techniques use the Likert scale. Based on the analysis results it is known that the community has sufficient cognitive response to the convict exemption policy with a mean value of 2.96, affective 2.83, conative 3.83. Then deduced from these three dimensions into a community response with a mean value of 3.20 and a socialization is needed to the community regarding the policy of inmate release.

Keywords: *community response; convict's liberation policy; Covid-19.*

Ardyan Gilang Ramadhan, Maria Lusyana Br Ginting, Chintia Octenta (The Ministry of Law and Human Rights)

The Effectiveness of Self Reliance Development Programs in The Correctional Institutions Industry-Based

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 2, Juli 2021

Correctional aims to form members of the prison to become fully human, aware of mistakes, improve themselves and not repeat criminal acts so that community can accept them again. An Effort by The Directorate General of Corrections is to develop prisoners' independence so that prisoners can independently fulfil their needs after leaving the correctional facility. This study aims to determine how the prisoners 'independence development and strategies and the effectiveness of implementing the prisoners' independence development program. The type of research is descriptive qualitative, with the research location at the Class IIA Karawang Prison and the Class IIA Cikarang Prison. The results of this study indicate that the implementation of the prison development program is going well. Class IIA Cikarang Prison and Class IIA Karawang Prison are unique in implementing the programme of prisoners independence. These two prisons have succeeded in meeting PNBP targets and training for certified prisoners. This research suggests that it is necessary to pay attention to the targeted market and used by the community as the priority of the prisoners' independence program. Besides of that, it is also necessary for correctional centre or community adviser to know whether the skills development provided in prison is beneficial and sustainable.

Keywords: *effectiveness; correctional; self-reliance development.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Landra Fikri Dzaky, Arisman (The Ministry of Law and Human Rights)

Strategic Environmental Analysis in Spread Prevention of Covid-19 At State Detention Center Class IIB Kudus

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 2, Juli 2021

At the end of 2019, a new Corona virus variant was found in the city of Wuhan, China, which was named the SARS-CoV-2 Virus or known as Covid-19. Covid-19 attacks the respiratory system in humans, which spreads between humans in various countries, including Indonesia. Various policies have been issued to prevent the spread of Covid-19, but every day there are still additional positive cases of Covid-19. One of them is the policy to avoid the spread of Covid-19 in the Class IIB Kudus State Detention Center. This study aims to conduct a Strategic Environmental Analysis of the Prevention of the Spread of Covid-19 in the Class IIB Kudus State Detention Center so that effective efforts are known in preventing the spread of Covid-19. The type of research is mixed-method research in the form of quantitative data used to perform Swot analysis, qualitative data and the result of interview so that it can describe the results of the analysis. The result shows that the efforts to prevent the spread of Covid-19 by the Kudus Class IIB Rutan showed an aggressive strategy located in quadrant I so that the Kudus Class IIB Rutan can maintain existing methods and add new method as a form of innovation. The result of this study also finds the fact that the efforts to prevent the spread of Covid-19 carried out by the Class IIB Kudus State Detention Center are very effective to minimize the positive number of Covid-19.

Keywords: *Covid-19; Analysis; Prevention; Detention Center; SWOT.*

Ahmad M Ramli, Sinta Dewi, Laina Ra ianti, Tasya Sa iranita Ramli, Sherly Ayuna Putri, Maudy Andreana Lestari (Padjajaran University)

Protection of Trade Secrets in Telecommunication Industry

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 2, Juli 2021

Undeniable, the world is changing rapidly in the era of globalization. The combination of technology with telecommunications has led a revolution in information systems. Nowadays, the world seems more comfortable to access various kinds of data and information, even in a matter of seconds. This is in line with trade secrets as part of intellectual property with high economic value. The high economic value of trade secrets is inherent because of the information that is not known to the public.This condition is quite attractive. In this era, telecommunications service industry has a big responsibility to protect any data that enters the digital world. There is a risk of leakage of confidential data, which creates new problems related to data protection in the telecommunications service industry. The normative juridical method used in this study was the data collection technique carried out online. The results of this study is a reference regarding the appropriate regulation according to Indonesia's needs in responding to data protection as trade secrets in telecommunications services that have not been accommodated properly at this time. Through optimizing the existence of umbrella regulations and formulating special policies in the telecommunications sector in the form of co-regulation or self-regulation.

Keywords: *information technology; telecommunication services industry; trade secret.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Ilham Yuli Isdiyanto, Deslaely Putranti (Ahmad Dahlan University, Jogjakarta)

Legal Protection of Traditional Cultural Expression and The Existence of Customary Law Society of Kampung Pitu

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 2, Juli 2021

The people of Kampung Pitu still hold traditions and culture of their origins until today. Even, they still hold the tradition that in Kampung Pitu cannot be more than 7 (seven) Householders. As a distinctive traditional society, the people of Kampung Pitu have various Traditional Cultural Expression (TCE) which need serious attention from the Government. TCE in Indonesia regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, which can protect the TCE of Kampung Pitu Society. This research is essential because in the Special Region of Yogyakarta, not so many traditional communities who defend their rights of origin. This research is study with a doctrinal approach and for data collection, both primary and secondary, obtained online and offline, as well as descriptive-qualitative analysis and in final. The result is, the people of Kampung Pitu can be categorized as Indigenous Society who have identity and traditional right over their origins; therefore, they need to be protected to preserve their existence. Even though there is no specific regulation or stipulation from Central to Regional Government regarding Kampung Pitu, but Kampung Pitu has been designated as an Intangible Cultural Heritage, thus, becomes the basis for the protection of Kampung Pitu.

Keywords: *protection; kampung pitu; traditional cultural expression; indigenous society; legal protection.*

Supriyadi, Andi Intan Purnamasari (Tadulako University, Palu)

Method Of Ideas For The Use Of Omnibus law In The Formation Of Regional Regulation

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 2, Juli 2021

Omnibus law has become a debate among the public since the government has announced to use it in the formation of laws, the pros and cons are present because the Omnibus law method tends to be used by countries with a common law system. However, the presence of the Job Creation Act is an answer that this method is also contextual and relevant for use in the Civil law system. This study focuses on answering (a) the Omnibus law in the formation of Legislation - Invitations; (b) The nature of regional regulations; (c) Use of the Omnibus law Method in the Establishment of Regional Regulations. The purpose of this study is to find out, understand, and analyze Omnibus law in the formation of Legislation - Invitations, the nature of Regional Regulations, and formulate the Use of the Omnibus law Method in Formation of Regional Regulations. The research method used is normative juridical research, with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the use of the Omnibus law method can be implemented on the substance of the content of Regional Regulations whose provisions for their formation are based on the implementation of the Law which is also formed through the Omnibus law method.

Keywords: *omnibus law; formation; regional regulation.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Insan Firdaus (The Ministry of Law and Human Rights)

Policy Analysis of The Implementation of The Merit System In Placement of Graduates of Correctional Science Polytechnic and Immigration Polytechnic

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 2, Juli 2021

Based on the merit system, graduates of Correctional Science Polytechnic (Poltekip) and Immigration Polytechnic (Poltekim) must be in the right position and job according to the competencies and needs of the organization, so that the implementation of the duties and functions of the Ministry of Law and Human Rights in the Correctional and Immigration sector is effective. This study aims to determine whether the placement of Poltekip and Poltekim graduates is in accordance with the merit system. This research method uses a qualitative and descriptive approach. Based on the research results, the placement of Poltekip and Poltekim graduates is in accordance with the merit system, they occupy functional positions in accordance with the study program. However, the placement has not been specifically determined and Poltekip graduates cannot be placed in all correctional work unit due to limited functional positions in the correctional sector. The suggestion in this study is to clearly state the part/field where the graduate is placed and it is necessary to form a new functional position in the correctional sector.

Keywords: *merit system; placement; competency.*

Faisal, Nursariani Simatupang (Muhammadiyah University of North Sumatra)

Nonpenal Policy For Preventive Efforts Children As Victims Of Physical and Psychical Violence In School

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 2, Juli 2021

The problem of violence against children often occurs in schools, there are factors that cause children to receive treatment in the form of physical and psychological violence at school so that various non-penal policies that can be applied to minimize the problem will be described. At school children are often the object of physical and psychological violence, especially when children neglect their obligations, or do not obey the rules set at school. The research method used is normative juridical. The purpose of this study is to answer the problem of violence against children that occurs in schools with a legal perspective. The results of the study indicate that the factors that cause children to become victims of physical and psychological violence at school are because children make mistakes or violate discipline. Violence is considered by teachers as a disciplinary action for students and is able to make students who commit disciplinary violations or mistakes realize the mistakes they have made and do not repeat their actions, and are intended so that other students do not follow in doing the same act. The recommendation from this problem is that various schools take preventive steps against the potential for violence against children by educating teachers and students.

Keywords: *preventive; children; violence; school.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Moch. Ridwan (Supreme Court of the Republic of Indonesia)

The System Approach To The Settlement Of Cassation Efforts

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 2, Juli 2021

This study discusses the completion of the cassation case process in terms of procedures, time and efforts of the Supreme Court leadership in resolving cases as part of legal remedies in the judicial system. The principle of fast, simple and low cost settlement of cases is continuously pursued. The completion of cassation cases which are complicated, experience delays and high costs, one of which is caused by inaccurate administrative procedures and flows, thus influencing the more effective settlement of cassations. What is the structural case settlement process in the Supreme Court in implementing judicial principles. This study aims to determine and analyze the settlement of this cassation case, using qualitative research methods with a combination of normative juridical and empirical juridical approaches which are analytical prescriptive in nature. Settlement of cases must be resolved by approaching and implementing a simpler organizational system at the central level. Thus, changes in organizational structure and function are part of the right solution in simplifying the procedures, mechanisms and functions for resolving cassation cases nationally.

Keywords: *supreme court; structure and function; cassation; system.*

Rizki Bagus Prasetio (The Ministry of Law and Human Rights)

Pandemic Covid-19: Emergency Constitusional Law Perspective and Human Rights Protection

Scientific Journal of Law Policy, Volume 15, Number 2, Juli 2021

Many countries are confused about which legal instrumen is right to overcome the Covid-19 pandemic crisis. Any country chooses to declare a state of emergency based on the constitution, use laws that apply to disasters or health crisis, and implement new legislation. The stipulation of a state of emergency allows the state to deviate from the rule of law and governments have introduced measures to legally justify limits on human rights. Therefore, the determination of the emergency status may be misused and affect on result human rights protection declines. This paper explains the Indonesian government's policy in choosing legal instrumens to overcome the Covid-19 pandemic and on the other hand how the government continues to guarantee the protection of human rights. As a result, although Article 12 of the 1945 Constitution stipulates the provision of an emergency, Indonesia chooses to use Health Emergency in Law 6 of 2018 and Non-Natural Disaster Emergency in Law 24 of 2007. The two emergency statuses do not involve Article 12 of the 1945 Constitution as the basis of its formation. The state of emergency is determined as an emergency as referred to in the study of the state of emergency or de facto not de jure. In addition, the two emergency statuses do not contain various requirements that have been mandated by the ICCPR. Therefore, the protection of human rights must always be fulfilled. Even if there are, this certainly does not apply to rights that are based only on non-derogable rights groups.

Keywords: *covid-19; state of emergency; emergency constitutional law; human rights.*

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Hasim Asngari, Padmono Wibowo (Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Cinere Depok)

Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pembebasan Narapidana dalam Rangka Penanggulangan Penyebaran Corona Virus Covid-19 di Dusun Punjul Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 2, Juli 2021

Wabah virus corona (Covid-19) yang sedang melanda dunia pada dewasa ini, hal tersebut bukan suatu wabah yang dianggap remeh atau diabaikan begitu saja. Implementasi kebijakan pemerintah terkait pembebasan narapidana melalui program integrasi dan program asimilasi adalah wujud upaya dalam menanggulangi penyebaran corona virus Covid-19 pada lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, maupun rumah tahanan negara. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui respon masyarakat mengenai kebijakan pembebasan narapidana guna penanggulangan penyebaran covid-19 di RT 022 RW 006 Dusun Punjul Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung yang dilihat dari tiga dimensi yaitu afektif, kognitif, dan konatif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan populasi yang berjumlah 102 orang , diambil sampel secara acak sejumlah 42 responden. Menggunakan angket skala Likert dalam teknik pengumpulan data. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa masyarakat memiliki kognitif yang cukup terhadap kebijakan pembebasan narapidana dengan nilai mean sebesar 2,96, Afektif sebesar 2,83, Konatif sebesar 3,83. Kemudian disimpulkan dari ketiga dimensi tersebut menjadi suatu respon masyarakat dengan nilai mean sebesar 3,20 dan diperlukan suatu sosialisasi terhadap masyarakat terkait kebijakan pembebasan narapidana.

Kata kunci: respon masyarakat; kebijakan pembebasan narapidana; Covid-19.

Ardyan Gilang Ramadhan, Maria Lusyana Br Ginting, Chintia Octenta (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 2, Juli 2021

Pemasyarakatan mempunyai tujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehinga masyarakat dapat menerima mereka kembali. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah merumuskan program pembinaan kemandirian narapidana agar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan narapidana dapat mandiri memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembinaan kemandirian narapidana dan strategi serta efektivitas keberhasilan dari pelaksanaan program pembinaan kemandirian narapidana. Jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian pada Lapas Kelas IIA Karawang dan Lapas Kelas IIA Cikarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program pembinaan narapidana berjalan dengan baik. Lapas Kelas IIA Cikarang dan Lapas Kelas IIA Karawang memiliki keunikan dalam implementasi program pembinaan kemandirian narapidana. Kedua Lapas ini berhasil memenuhi target PNBP dan pembinaan narapidana bersertifikat. Saran dari penelitian ini adalah perlu diperhatikan pasar yang ditargetkan dan banyak dibutuhkan atau digunakan oleh masyarakat sebagai program prioritas kemandirian narapidana. Selain itu, perlu pengamatan oleh balai pemasyarakatan atau pembimbing kemasyarakatan untuk mengetahui apakah pembinaan keterampilan yang telah dilberikan di Lapas bermanfaat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: efektivitas; pemasyarakatan; pembinaan kemandirian.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Landra Fikri Dzaky, Arisman (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan HAM)

Analisis Lingkungan Strategis Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Rutan Kelas IIB Kudus

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 2, Juli 2021

Pada akhir tahun 2019, telah ditemukan varian virus Corona baru di Kota Wuhan, Tiongkok yang diberi nama Virus SARS-CoV-2 atau lebih dikenal dengan Covid-19. Covid-19 menyerang sistem pernafasan pada manusia yang menyebar ke antar manusia di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk mencegah penyebaran Covid-19, tetapi masih terdapat penambahan kasus positif Covid-19. Salah satunya adalah kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Analisis Lingkungan Strategis Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus sehingga diketahui upaya-upaya yang efektif dalam pencegahan penyebaran Covids-19. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian *mix method* berupa data kuantitatif yang digunakan untuk melakukan analisis Swot, data kualitatif dan hasil wawancara sehingga dapat mendeskripsikan hasil analisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan penyebaran Covid-19 oleh Rutan Kelas IIB Kudus menunjukkan strategi agresif yang terletak di kuadran I sehingga Rutan Kelas IIB Kudus dapat mempertahankan metode yang telah ada dan menambah metode baru sebagai bentuk inovasi. Dalam hasil penelitian ini juga ditemukan fakta bahwa upaya-upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus sangat efektif dilakukan untuk meminimalisasi angka positif Covid-19.

Kata Kunci: Covid-19; Analisis; Pencegahan; Rutan; SWOT.

Ahmad M Ramli, Sinta Dewi, Laina Rafianti, Tasya Safiranita Ramli, Sherly Ayuna Putri, Maudy Andreana Lestari (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)

Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 2, Juli 2021

Tak dapat disangkal, pesatnya perubahan dunia pada era globalisasi berpangkal dari teknologi informasi yang kian berkembang. Berbaurnya teknologi dengan telekomunikasi menimbulkan revolusi pada sistem informasi. Dahulu, untuk mengakses atau mengolah data dan informasi, manusia membutuhkan proses yang panjang. Kini, dunia seolah diberikan kemudahan dalam mengakses dan terhubung dengan beragam informasi dan data yang tersaji. Lain halnya dengan Rahasia Dagang sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang bernilai ekonomi tinggi dalam kegiatan usaha di Indonesia. Nilai ekonomi dari Rahasia Dagang melekat karena adanya informasi yang sengaja untuk tidak diketahui oleh umum. Hal tersebut menjadikan elemen ini termasuk salah satu bagian yang cukup menarik atensi. Mengingat pada era ini, industri jasa telekomunikasi seolah menopang tanggung jawab besar untuk melindungi setiap data yang masuk ke dalam dunia digital. Terdapatnya resiko berupa kebocoran data yang bersifat rahasia menjadi problematika terhadap pelindungan data dalam industri jasa telekomunikasi. Dengan ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pengumpulan data yang dilakukan secara daring. Penelitian ini menghasilkan sebuah rujukan perihal pengaturan yang tepat sesuai kebutuhan Indonesia dalam merespon pelindungan data sebagai rahasia dagang pada jasa telekomunikasi yang belum terakomodir dengan baik saat ini. Melalui optimalisasi keberadaan *umbrella regulation* dan penyusunan kebijakan khusus dalam sektor telekomunikasi berupa *co-regulation* atau *self-regulation.*

Kata Kunci: industri jasa telekomunikasi; rahasia dagang; teknologi informasi.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Ilham Yuli Isdiyanto, Deslaely Putranti (Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta)

Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 2, Juli 2021

Masyarakat Kampung Pitu masih memegang tradisi dan budaya asal usulnya hingga sekarang, bahkan jumlah Kepala Keluarga yang tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) juga masih bertahan hingga sekarang. Sebagai masyarakat tradisional yang khas, masyarakat Kampung Pitu memiliki berbagai macam bentuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang disisi lain hal ini perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah. Regulasi di Indonesia mengatur perlindungan EBT melalui UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, sehingga dapat menjadi perlindungan EBT masyarakat Kampung Pitu agar tetap lestari. Penelitian ini menjadi sangat penting karena tidak banyak masyarakat tradisional yang mempertahankan hak asal-usulnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pengumpulan data baik primer maupun sekunder yang diperoleh secara daring serta analisa deskriptif-kualitatif. Hasilnya, masyarakat Kampung Pitu dapat dikategorikan sebagai Masyarakat Hukum Adat yang memiliki hak identitas dan tradisional atas asal-usulnya sehingga harus dilindungi dalam pelestariannya. Walaupun tidak ada regulasi ataupun penetapan dari tingkat Pusat sampai Daerah terkait Kampung Pitu, namun Kampung Pitu sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda sehingga menjadi dasar perlindungan.

Kata Kunci: perlindungan; Kampung Pitu; ekspresi budaya tradisional; perlindungan hukum.

Supriyadi, Andi Intan Purnamasari (Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palui)

Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 2, Juli 2021

Omnibus law menjadi perdebatan dikalangan masyarakat sejak pemerintah mencanangkan menggunakannya dalam pembentukan undang – undang, pro dan kontra hadir dikarenakan metode Omnibus law cenderung digunakan oleh negara yang bermatra *common law* sistem. Namun, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja menjadi jawaban bahwa metode ini juga kontekstual dan relevan untuk digunakan pada *civil law* sistem. Penelitian ini berfokus untuk menjawab (a) Omnibus law Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (b) Hakekat Peraturan Daerah; (c) Penggunaan Metode Omnibus law dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa Omnibus law Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hakekat Peraturan Daerah, dan merumuskan Penggunaan Metode Omnibus law dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan metode Omnibus law dapat diimplementasikan terhadap subtansi materi muatan Peraturan Daerah yang ketentuan pembentukannya didasarkan atas pelaksanaan undang-undang yang juga dibentuk melalui metode Omnibus law.

Kata kunci: omnibus law; pembentukan; peraturan daerah.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Insan Firdaus (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

Analisa Kebijakan Penerapan Sistem Merit dalam Penempatan Lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 2, Juli 2021

Berdasarkan sistem merit penempatan lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) harus pada jabatan dan pekerjaan yang tepat sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Penempatan yang tepat dapat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang Pemasyarakatan dan Imigrasi. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui apakah penempatan lulusan Poltekip dan Poltekim telah sesuai dengan sistem merit? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penempatan lulusan Poltekip dan Poltekim telah sesuai dengan sistem merit. Penempatan ditentukan berdasarkan program studi dan menduduki jabatan fungsional di bidang pemasyarakatan dan imigrasi yang kualifikasi dan uraian tugasnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Meskipun demikian, penempatan tersebut belum spesifik ditentukan bagian atau bidang apa lulusan Poltekip dan Poltekim ditempatkan, sehingga berpotensi ditempatkan pada bidang yang tidak sesuai kompetensi. Selain itu, lulusan Poltekip belum dapat ditempatkan di semua unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang disebabkan jabatan fungsional dibidang pemasyarakatan yang ada saat ini belum mencakup seluruh tugas dan fungsi pemasyarakatan. Saran dalam kajian ini yaitu agar disebutkan secara jelas bagian/bidang dimana lulusan tersebut ditempatkan dan perlu dibentuk jabatan fungsional baru di bidang pemasyarakatan.

Kata Kunci: sistem merit; penempatan; kompetensi.

Faisal, Nursariani Simatupang (Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara)

Kebijakan Nonpenal dalam Rangka Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 2, Juli 2021

Problematika kekerasan terhadap anak sering terjadi di sekolah, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan anak menerima perlakuan berupa kekerasan fisik m aupun psikis disekolah sehingga akan diurai berbagai kebijakan non-penal yang dapat diterapkan untuk meminimalisir permasalahan itu. Di sekolah anak sering menjadi objek kekerasan fisik dan psikis, terutama di saat anak melalaikan kewajibannya, atau tidak mematuhi aturan yang ditetapkan di sekolah. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab permasalahan kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah dengan perspektif hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan fisik dan psikis di sekolah dikarenakan anak melakukan kesalahan atau pelanggaran disiplin. Kekerasan dianggap oleh guru sebagai tindakan pendisiplinan anak didik serta mampu menjadikan anak didik yang melakukan pelanggaran disiplin atau kesalahan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta dimaksudkan agar anak didik yang lain, tidak mengikuti melakukan perbuatan yang sama. Rekomendasi dari permasalahan itu, agar berbagai sekolah melakukan langkah preventif terhadap potensi kekerasan pada anak dengan melakukan edukasi kepada guru dan peserta didik.

Kata kunci: preventif; anak; kekerasan; sekolah.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dicopy Tanpa Izin dan Biaya

Moch. Ridwan (Balitbangdiklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I.)

Pendekatan Sistem dalam Penyelesaian Upaya Kasasi

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 2, Juli 2021

Penelitian ini membahas penyelesaian proses perkara kasasi dari segi prosedur, waktu dan upaya Pimpinan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara sebagai bagian dari upaya hukum dalam sistem peradilan. Pelaksanaan prinsip penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, secara terus-menerus diupayakan. Penyelesaian perkara kasasi yang rumit, mengalami keterlambatan dan biaya tinggi tersebut, satu diantaranya disebabkan oleh prosedur dan alur administrasi yang kurang tepat, sehingga berpengaruh pada penyelesaian kasasi yang lebih efektif. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara secara struktural di Mahkamah Agung dalam melaksanakan prinsip peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara kasasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kombinasi pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang bersifat preskriptif analitis. Penyelesaian perkara harus diselesaikan dengan pendekatan dan penerapan sistem keorganisasian yang lebih sederhana pada tingkat pusat. Dengan demikian, perubahan struktur maupun fungsi keorganisasian, merupakan bagian dari solusi yang tepat dalam menyederhanakan prosedur, mekanisme dan fungsi penyelesaian perkara kasasi secara nasional.

Kata kunci: mahkamah agung; struktur dan fungsi; kasasi; sistem.

Rizki Bagus Prasetio (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 15, Nomor 2, Juli 2021

Banyak negara bimbang menggunakan instrumen hukum mana yang tepat agar dapat menanggulangi krisis akibat pandemi Covid-19. Ada yang memilih menetapkan keadaan darurat berdasar konstitusi, menggunakan UU yang berlaku tentang kebencanaan atau krisis kesehatan, dan melakukan legislasi baru. Penetapan keadaan darurat memungkinkan negara melakukan penyimpangan keberlakuan hukum bahkan menangguhkan HAM sementara waktu. Oleh kerenanya penetapan status darurat berpotensi disalahgunakan dan berakibat pada tereduksinya jaminan perlindungan HAM. Tulisan ini menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia dalam memilih instrumen hukum untuk menanggulangi Pandemi Covid-19 disatu sisi dan disisi lain bagaimana pemerintah tetap menjamin perlindungan HAM. Hasilnya, meskipun Pasal 12 UUD 1945 menyediakan ketentuan keadaan darurat konstitusional, Indonesia memilih menggunakan Kedaruratan Kesehatan dalam UU 6 Tahun 2018 dan Darurat Bencana Non Alam dalam UU 24 Tahun 2007. Dua status darurat tersebut tidak sama sekali melibatkan Pasal 12 UUD 1945 sebagai dasar pembentukannya. Sehingga keadaan darurat dimaksud bukanlah state of emergency sebagaimana dimaksud dalam kajian hukum tata negara darurat atau hanya bersifat *de facto* bukan *de jure*. Selain itu, dua status darurat tersebut tidak memuat berbagai syarat yang sudah diamanatkan ICCPR. Oleh karenanya perlindungan HAM harus tetap dipenuhi. Meskipun ada pembatasan, hal tersebut tentunya tidak berlaku bagi hak yang bersifat mendasar apalagi terhadap kelompok *non derogable rights.*

Kata Kunci: **covid-19; keadaan darurat; hukum tata negara darurat; hak asasi manusia.**